

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN ANAK
DI BAWAH UMUR DAN AKIBAT HUKUMNYA
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)**

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh:

RABBIL SONYA GESA

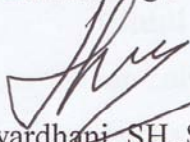
C.100.080.146

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2012**

PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta pada :

Pembimbing I



(Nuswardhani, SH.,SU)

Pembimbing II



(Suparto, SH)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Iksan, SH.,MH)

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **RABBIL SONYA GESA**

NIM : **C.100.080.146**

Fakultas/Jurusan : **Hukum**

Jenis : **Skripsi**

Judul : **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN
ANAK DI BAWAH UMUR DAN AKIBAT HUKUMNYA
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)**

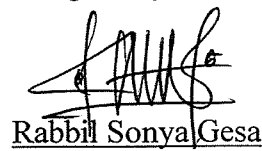
Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan bebas hak royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu memintai ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 01 Agustus 2012

Yang Menyatakan,



Rabbil Sonya Gesa
C.100.080.146

ABSTRAK

Rabbil Sonya Gesa. C.100.080.146. *Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur, untuk mengetahui dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur serta untuk mengetahui akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur dalam Penetapan Izin Perkawinan di Pengadilan Agama Sukoharjo.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau menuturkan yang pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan untuk selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan skripsi ini. Sedangkan metode pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan berupa data hasil wawancara dan penetapan dispensasi nikah yang telah dijelaskan dalam uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan No.0052/Pdt.P/2011/PA.Skh dan No.030/Pdt.P/2010/PA.Skh cukup beralasan untuk dikabulkannya permohonan dispensasi nikah ini. Serta hakim dapat menyesuaikannya dengan peraturan perundangan yang mengatur perkara permohonan dispensasi nikah. Sehingga melalui adanya penyesuaian antara hukum yang berlaku terhadap kenyataan yang terjadi maka didapat suatu penetapan yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu hakim mempertimbangkan keputusannya dengan melihat kemaslahatan umat atau kepentingan umum dari para pihak. Sedangkan mengenai dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur, seorang hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kaidah Fiqhiyyah menjadi dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur. Serta untuk akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur itu sendiri bahwa anak tersebut telah dianggap dewasa dan cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi.

Pengaturan mengenai perkawinan anak di bawah umur dan dispensasi nikah ini telah diatur dengan jelas dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Kata kunci: Perkawinan Anak di Bawah Umur, Akibat Hukum

ABSTRACT

Rabbil Sonya Gesa. C.100.080.146. *Judicial Review On Marriage of minors and Due statute (Case Studies in the Religious Sukoharjo)*. Thesis. Law Faculty Muhammadiyah University of Surakarta.

The purpose of this study is to determine the consideration of the judge to grant marriage licenses to minors, to know the legal basis for the judge to grant marriage licenses to minors and to know the legal consequences of marriage after the child made under the Marriage License Determination in the Religious Sukoharjo.

In this study, the authors use this type of descriptive research. As referred to in this study is to interpret or said which essentially is a way to solve existing problems, then the data is collected, compiled, summarized the basis for subsequent use in the preparation of this thesis. While the method of approach in this study the authors use the method of juridical sociological approach.

Based on the data already collected the data in the form of interviews and determining the dispensation of marriage that has been described in the description and discussion of research results, it can be concluded that the judge considered in determining reasonable No.0052/Pdt.P/2011/PA.Skh and No.030/Pdt.P/2010/PA.Skh petition is granted a dispensation for this marriage. And judges can customize it with laws and regulations governing the application for dispensation of marriage case. So through an adjustment between the law applicable to the reality of the matter then obtained a determination that sense of fairness to the parties concerned. Therefore, the judge reconsider his decision to see the benefit of the people or the general interests of the parties. While the legal basis used by the judge in granting a marriage license application for minors, a judge must have a solid basis for the decision can be accounted for. The judge must include the consideration that sufficient and mature in every keputusan.seorang judge must have a solid basis for the decision can be accounted for. The provisions of Article 6 paragraph (1) and Article 7 paragraph (1) (2) of Law no. 1 of 1974, Article 15 paragraph (1) and Article 53 of the Compilation of Islamic Law (KHI), and Rule Fiqhiyyah basis in law judge to grant marriage licenses to minors. As well as to the legal effect after the child made under the age of marriage itself that the child has considered adults and competent in performing a legal act or he is not under guardianship his parents again.

Regulation of marriage and children under the age of marriage dispensations have been set out clearly in the Law. 1 of 1974 on Marriage, PP. 9 Year 1975 on the Implementation of the Marriage Law and the Presidential Instruction No.. 1 in 1991 about the Compilation of Islamic Law in Indonesia.

Key words: Marriage of minors, Legal Consequences

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN ANAK
DI BAWAH UMUR DAN AKIBAT HUKUMNYA
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)**

A. PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.¹ Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, Undang-undang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”*

Sangat jelas tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 butir c UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa.

Oleh karena itu, ditentukan batas umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Namun dalam keadaan yang sangat memaksa, perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua. Muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu hamil sebelum menikah. Dilihat dari faktor sosiologis yang terjadi saat ini semakin bebas pergaulan anak yang menyebabkan anak luar kawin, hal ini dilatar belakangi oleh faktor intern dalam keluarga yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua dan faktor ekstern yaitu dari faktor sosiologis yang kurang baik yang menyebabkan anak terjerumus dalam pergaulan bebas.

Sehingga berdasar latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur, dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur serta akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal menambah wawasan atau pengetahuan terutama bagi penulis pribadi dalam bidang hukum perdata, memberikan sumbangan penelitian bagi Pengadilan Agama dalam meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga peradilan yang

senantiasa menegakkan keadilan dan menjamin kepastian hukum. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan cara pandang dari kaca mata hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Penggunaan jenis penelitian deskriptif dalam penelitian ini, yaitu pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²

Sumber data penelitian didapatkan dari hasil penelitian kepustakaan, meliputi; Bahan hukum primer berupa KUHPerdara (BW), UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Th. 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, UU No. 23 Th.2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 4 Th. 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, PP No. 9 Th. 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, UU No. 7 Th 1989 Tentang Pengadilan Agama, Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Nomor : 0052/Pdt.P/2011/PA.Skh dan Nomor : 030/Pdt.P/2010/PA.Skh. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang relevan dan terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Selain penelitian kepustakaan, ada pula penelitian lapangan, yang terdiri dari menentukan lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama

² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal. 54

Sukoharjo karena cukup banyak data-data yang penulis butuhkan mengenai penanganan perkara permohonan dispensasi nikah, selain itu ada pula subjek dalam penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data dengan jalan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mana semua bahan hukum tersebut dipelajari dan dikaji untuk dijadikan pedoman atau landasan dalam menyusun dan melakukan penelitian, serta penelitian studi lapangan penelitian lapangan berupa Pengamatan (*observasi*), Membuat daftar pertanyaan, Wawancara (*interview*).

B. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Perkawinan Bagi Anak di Bawah Umur

Dalam mengeluarkan suatu penetapan seorang hakim haruslah memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum. Mengenai pertimbangan peristiwanya, didapat melalui keterangan para saksi. Setelah memahami peristiwa/duduk perkaranya, maka dalam hal ini hakim dapat menyesuaikannya dengan peraturan perundangan yang mengatur perkara permohonan dispensasi nikah. Sehingga melalui adanya penyesuaian antara hukum yang berlaku terhadap kenyataan yang terjadi maka akan didapat suatu penetapan yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan.

Mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan di bawah umur dalam penetapan izin perkawinan dengan Nomor :

0052/Pdt.P/2011/PA.Skh. dan Nomor : 030/Pdt.P/2010/PA.Skh. Pada posita atau duduk perkara dalam penetapan Nomor : 0052/Pdt.P/2011/PA.Skh bahwasanya pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena antara anak Pemohon, Umi Khasanah binti Karjo dengan calon suami anak Pemohon Triyadi bin Trimio telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Dalam hal seperti ini boleh dilakukan penyimpangan perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan dari kedua calon pengantin dan dikuatkan dengan pengakuan kedua orang tua calon mempelai, bahwa hubungan cinta antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki telah terlalu dekat, sehingga tidak dapat dipisahkan lagi.

Sedangkan dalam penetapan Nomor : 030/Pdt.P/2010/PA.Skh, pada posita atau duduk perkaranya bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena antara anak Pemohon, Wahid Diannuri bin Jumadi dengan calon isteri anak Pemohon Kurniawati Pujining Rahayu binti Bambang Purwanto telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun 4 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Hal ini terbukti bahwa calon pengantin perempuan telah dalam keadaan hamil 2 bulan. Dalam hal seperti ini boleh

dilakukan penyimpangan perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan. Hal ini dibuktikan dari pengakuan dari calon pengantin perempuan bahwa dirinya telah 2 bulan mengandung hasil hubungannya dengan anak Pemohon. Dan pengakuan dari calon pengantin perempuan dikuatkan dengan keadaan perutnya yang agak membuncit. Hal ini dibenarkan oleh anak Pemohon.

Sehingga yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur dalam penetapan izin perkawinan di Pengadilan Agama Sukoharjo adalah :

- 1) Karena sudah hamil terlebih dahulu (hamil di luar nikah) atau sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri.

Menurut penulis memang dalam kasus ini, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur harus sangat matang. Seperti dalam penetapan Nomor 030/Pdt.P/2010/PA.Skh yang dalam penetapan tersebut bahwa calon isteri dari anak Pemohon telah dalam keadaan hamil 2 bulan. Jadi, menurut penulis dapat disimpulkan bahwa dalam situasi yang mendesak seorang hakim dapat mengabulkan dispensasi perkawinan anak di bawah umur.

- 2) Karena kekhawatiran orang tua. Orang tua khawatir anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas.

Dalam penetapan Nomor : 0052/Pdt.P/2011/PA.Skh pemohon merupakan orang tua dari anak perempuan yang usianya masih 15 tahun dan anak Pemohon memiliki seorang kekasih berusia 24 tahun. Karena

diantara anak Pemohon dengan kekasihnya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun dan hubungan cinta mereka sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, dan Pemohon sangat khawatir anaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Oleh karena itu hakim mempertimbangkan keputusannya dengan melihat kemaslahatan umat atau kepentingan umum dari para pihak.

3) Karena masalah ekonomi keluarga.

Masalah ekonomi keluarga di sini luas dan perlu penulis perjelas bahwa orang tua pihak perempuanlah yang merasa bahwa apabila anaknya menikah dengan laki-laki lain, maka akan sangat membantu perekonomian orang tuanya. Dan masalah perekonomian keluarga itu bukan merupakan suatu keadaan yang mendesak. Karena yang dimaksud keadaan mendesak disini adalah keadaan dimana apabila tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan dampak yang buruk bagi pihak yang bersangkutan. Jadi, hakim cukup melihat ada tidaknya alasan yang mendesak yang menyebabkan harus dikabulkannya perkara ini.

C. Dasar Hukum Bagi Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Perkawinan Bagi Anak di Bawah Umur

Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap

keputusan. Permohonan dispensasi usia perkawinan merupakan gugat yang bersifat *voluntair*. Dengan kata lain, undang-undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut *beschikking* dalam arti luas.³

Permohonan dispensasi dapat dikabulkan oleh hakim dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

- 1) Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) (2) menjadi dasar hukum bagi hakim dalam menentukan penetapannya, yaitu Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi, “*Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*”. Maksudnya, perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kemudian pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, “*Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun*”. Maksudnya adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur

³ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 12

untuk perkawinan. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, *“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”*. Maksudnya, apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

Jadi, pada penetapan Nomor : 0052/Pdt.P/2011/PA.Skh dan 030/Pdt.P/2010/PA.Skh, menggunakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur.

2) Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Selain ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dasar hukum bagi hakim yang lain adalah Pasal 15 dan Pasal 53 KHI.

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.*

Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.*
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.*
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.*

Menurut ketentuan di dalam Pasal 15 KHI ini secara jelas telah membatasi umur calon mempelai (calon suami dan istri), sesuai dengan undang-undang yang berada di atasnya yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Namun demikian, aturan hukum tersebut tidak merinci alasan mengajukan hukum dispensasi nikah.

Pada penetapan Nomor : 0052/Pdt.P/2011/PA.Skh, hakim menggunakan Pasal 15 KHI karena memang usia anak Pemohon masih di bawah umur. Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyatakan bahwa usia anak Pemohon belum genap 19 tahun. Hakim tidak menggunakan ketentuan Pasal 53 KHI sebagai dasar hukum pada penetapan ini karena hakim tidak menemukan fakta bahwa calon isteri anak Pemohon dalam keadaan hamil.

Sedangkan dalam penetapan Nomor : 030/Pdt.P/2010/PA.Skh, hakim menggunakan Pasal 15 dan Pasal 53 KHI, karena pada Pasal 15 KHI hakim menemukan fakta bahwa usia anak Pemohon masih di bawah umur, yaitu 16 tahun 5 bulan. Dan pada Pasal 53 KHI hakim menemukan fakta bahwa calon isteri anak Pemohon telah dalam keadaan hamil 2 bulan. Sehingga dalam penetapan Nomor : 030/Pdt.P/2010/PA.Skh hakim menggunakan pasal tersebut sebagai dasar hukumnya. Dan jika ditemukan

fakta hukum dalam suatu penetapan bahwa pihak perempuan telah hamil sebelum adanya perkawinan yang sah, maka dalam hal darurat seperti ini boleh dilakukan penyimpangan perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan.

3) Kaidah Fiqhiyyah

Selain ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, hakim juga menggunakan dasar hukum lain yakni Kaidah Fiqhiyyah dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur. Hal ini sesuai karena dalam setiap penetapan dispensasi izin perkawinan selalu dicantumkan Kaidah Fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

د ر أ المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan”

Hakim memandang bahwa mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan dapat menghindari kerusakan maka dari itu harus segera dilakukan perkawinan agar status kedua calon mempelai jelas dan status anak yang akan dilahirkan nanti juga jelas. Apabila permohonan dispensasi usia perkawinan tidak dikabulkan dalam kondisi yang sangat memaksa, maka akan terjadi kerugian yang sangat besar yang akan dialami oleh calon mempelai perempuan dan anak yang ada di dalam kandungannya.

Jadi, dalam penetapan Nomor : 0052/Pdt.P/2011/PA.Skh dan 030/Pdt.P/2010/PA.Skh, hakim menggunakan dasar hukum Kaidah Fiqhiyyah supaya tidak menimbulkan mafsadat bagi kedua calon pengantin dan seluruh keluarga mereka. Oleh karena itu, keadaan tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus segera diakhiri sebagai bentuk perlindungan hukum kepada kedua calon mempelai dan seluruh keluarga mereka.

D. Akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur

Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan isteri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbullah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan. Maksud anak sah di sini adalah karena pada saat ia lahir ia mempunyai ayah dan ibu dan dari hasil pernikahan yang sah pula.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Dalam memberikan pertimbangannya, majelis hakim Pengadilan Agama Sukoharjo berdasarkan pada berbagai fakta hukum yang didapat dari berbagai alat bukti, melalui pengumpulan berbagai alat bukti, hakim dapat mengetahui dengan jelas perihal permasalahan yang terjadi/duduk peristiwanya. Fakta yang telah diperoleh kemudian disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga akan didapat suatu penetapan yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan.

Di perumusan masalah yang pertama pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak dibawah umur dalam penetapan izin perkawinan di Pengadilan Agama Sukoharjo yaitu yang pertama karena anak tersebut sudah hamil terlebih dahulu atau sudah pernah/sering melakukan hubungan layaknya suami isteri. Dalam penetapan Nomor : 030/Pdt.P/2010/PA.Skh bahwa calon isteri dari anak Pemohon telah dalam keadaan hamil 2 bulan. Sehingga apabila dilihat dari segi manfaat maupun mudharatnya maka hakim terpaksa untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut. Yang kedua karena kekhawatiran orang tua anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas karena hubungan anaknya yang sudah terlalu dekat sehingga sulit dipisahkan. Dalam penetapan Nomor : 0052/Pdt.P/2011/PA.Skh ini diantara anak Pemohon dengan kekasihnya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun

dan hubungan cinta mereka sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan Pemohon sangat khawatir anaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan Agama Sukoharjo. Dan yang terakhir karena masalah ekonomi keluarga. Perlu penulis perjas bahwa masalah ekonomi keluarga di sini yaitu orang tua pihak perempuanlah yang merasa bahwa apabila anaknya menikah dengan laki-laki lain, maka akan sangat membantu perekonomian orang tuanya. Dan menurut penulis masalah perekonomian keluarga itu bukan merupakan suatu keadaan yang mendesak. Karena yang dimaksud keadaan mendesak disini adalah keadaan dimana apabila tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan dampak yang buruk bagi pihak yang bersangkutan.

Dalam perumusan masalah kedua yaitu dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur. Dasar yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur di Pengadilan Agama Sukoharjo antara lain adalah Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kaidah Fiqhiyyah.

Sedangkan dalam perumusan masalah yang ketiga yaitu akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur, yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan

suatu perbuatan hukum, atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah selama ia menikah sebagai akibat ia dinikahkan.

2. Saran

Pada akhirnya, penulis menyarankan agar bagi hakim yang menangani perkara dispensasi nikah agar memperketat persyaratan-persyaratan dalam mengajukan permohonan izin dispensasi nikah dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kasus perkawinan di usia dini yang sekarang sedang marak terjadi di Indonesia, di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dicantumkan alasan-alasan izin dispensasi nikah, agar hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah dapat memberikan pertimbangan atau keputusan yang terbaik tanpa ada campur tangan dari pihak manapun, serta lebih memperhatikan lagi akibat-akibat yang ditimbulkan apabila dikabulkan permohonan ijin kawin di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra

Aditya Bakti.

Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*,
Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.